



Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan (**Musrenbang**) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Filosofi Logo Musrenbang Provinsi Jawa Barat

Warna

Identitas Jabar (Biru, Kuning, Hijau)

Huruf M

M merupakan Inisial dari Musrenbang Jabar

Vector Gedung Sate

Vector gedung sate merupakan identitas bagi Jawa Barat

Bentuk Perisai

Sebagai ilustrasi dari melambangkan kekuatan ilmu untuk bertahan yang mampu bertahan walaupun diterpa berbagai permasalahan di ranah perencanaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyajikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Pedoman ini disusun sebagai upaya memberikan gambaran mekanisme, agenda kegiatan, serta informasi umum dalam pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelerasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan dokumen ini serta yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Musrenbang secara keseluruhan. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat sebagai informasi dalam pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Bandung, 22 April 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat

Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Landasan Hukum	9
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	10
2.1 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat	10
2.2 Sesi diskusi / <i>sharing discussion</i>	17
2.3 Pelaksanaan Pameran tentang Pembangunan Jawa Barat	32
2.4 Peserta dan Narasumber Musrenbang Provinsi.....	35
3BAB III PENUTUP	37
DAFTAR LAMPIRAN	38
Rangkaian Acara Musrenbang Tahun 2024	
Rangkaian Acara Sharing Discussion	
Form Masukan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan satu bagian yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2025-2045. Berdasarkan aturan tersebut, Musrenbang didefinisikan sebagai forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, diantaranya pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2025-2045 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Tahun 2025-2045 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek Pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan Masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku Pembangunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integrative; dan
7. Pendekatan spasial.

Selanjutnya, Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, digunakan empat pendekatan utama yaitu: (1) teknokratik, (2) partisipatif, (3) politis, (4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Kegiatan Musrenbang Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan Musrenbang pada penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Bapak Bey Triadi Machmudin. Dengan mengusung semangat berinovasi dan berkolaborasi, perencanaan pembangunan tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan 5 (lima) metode pelaksanaan, yaitu: 1) kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*); 2) Kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/Umat, CSR, dan KPBU; 3) Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah; 4) Pendekatan Spasial dan A-Spasial melalui 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP); 5) Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didefinisikan sebagai forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap perencanaan. Kegiatan Musrenbang Provinsi merupakan kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menjangkau aspirasi, masukan dan saran dari pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, diantaranya perwakilan Pemerintah Pusat/BAPPENAS, DPRD Provinsi, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Vertikal serta Tokoh Masyarakat Jawa Barat.

Kegiatan musrenbang ini merupakan kegiatan nonfisik lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya dan patut untuk dilaksanakan sebagai instrumen perencanaan yang efektif untuk memastikan perencanaan telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta merupakan tahapan yang wajib untuk dilaksanakan sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Musrenbang merujuk pada proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ini adalah tahap di mana pemerintah daerah, bersama dengan berbagai pihak terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan masyarakat umum, melakukan diskusi dan perencanaan terkait prioritas pembangunan daerah untuk periode tertentu. Pelaksanaan Musrenbang sangat penting karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tujuan pelaksanaan Musrenbang pada perencanaan pembangunan adalah untuk:

1. Terwujudnya pencapaian visi dan misi daerah.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan .
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi dan dunia usaha, serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan

dengan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 bahwa Musrenbang RPJPD dilaksanakan dalam rangka pembahasan Rancangan Awal RPJPD serta pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi.

1. Pembahasan Rancangan RPJPD Provinsi pada acara Musrenbang dilaksanakan dalam rangka:

- a) Partisipasi Publik: Musrenbang adalah wadah partisipasi publik yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Pembahasan Rancangan RPJPD Provinsi di Musrenbang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa berbagai suara dan aspirasi masyarakat terwakili dalam Rancangan RPJPD.
- b) Penyusunan Prioritas Pembangunan: Melalui pembahasan di Musrenbang, berbagai prioritas pembangunan dapat diidentifikasi dan dinilai berdasarkan urgensi, dampak, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam Rancangan RPJPD.

- c) Analisis Masukan dan Saran: Pembahasan Rancangan RPJPD Provinsi di Musrenbang juga memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap masukan dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam menyusun Rancangan RPJPD yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pembahasan di Musrenbang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memungkinkan mereka untuk menyampaikan masukan dan mengikuti perkembangan Rancangan RPJPD, proses tersebut menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e) Legitimasi Kebijakan: Dengan melibatkan partisipasi luas dari berbagai pihak, pembahasan Rancangan RPJPD Provinsi di Musrenbang juga bertujuan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih diterima oleh masyarakat dan memiliki landasan yang kuat dalam aspirasi dan kebutuhan mereka.
- f) Secara keseluruhan, pembahasan Rancangan RPJPD Provinsi pada acara Musrenbang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan Rancangan RPJPD Provinsi pada acara Musrenbang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Pembahasan Rancangan RKPD Provinsi pada acara Musrenbang dilaksanakan dalam rangka:

- a) menyetakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b) menyetakati prioritas pembangunan Daerah;
- c) menyetakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
- d) menyetakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- e) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
- f) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2025-2045.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang bertempat di The Trans Luxury Hotel Jalan Gatot Subroto No 289 Bandung.

Pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berikut disampaikan poin mekanisme kegiatan pada acara Musrenbang:

2.1 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) melibatkan serangkaian tahapan dan proses yang penting untuk memastikan partisipasi yang efektif dari berbagai pihak terkait. Pada acara Musrenbang ini menghadirkan narasumber dari:

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia;
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Pelaksanaan tersebut meliputi:

1. **Persiapan Acara:**

- Pelaksanaan Musrenbang bertempat di The Trans Luxury Hotel Jalan Gatot Subroto no 289 Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024
- Mengundang peserta dari berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
- Menyusun agenda acara yang mencakup pembahasan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan masalah-masalah pembangunan lainnya serta pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. **Pembukaan Acara:**

- Acara dimulai dengan sambutan pembukaan oleh pimpinan acara, seperti kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- Sambutan tersebut menjelaskan tujuan Musrenbang, pentingnya partisipasi masyarakat, dan harapan dari hasil Musrenbang.

3. **Pemaparan Materi:**

- Tim perencanaan atau pemerintah daerah memaparkan materi terkait RPJPD, program-program pembangunan, anggaran, dan masalah-masalah pembangunan lainnya.

- Pemaparan dilakukan secara jelas dan komprehensif untuk memudahkan pemahaman peserta.

4. **Diskusi dan Konsultasi:**

- Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan menyampaikan aspirasi terkait pembangunan.
- Diskusi dilakukan secara terstruktur dan moderat, sehingga semua peserta dapat berpartisipasi dengan efektif.

5. **Penyusunan Aspirasi dan Usulan:**

- Peserta secara aktif menyusun aspirasi dan usulan pembangunan berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi.
- Aspirasi dan usulan tersebut mencakup prioritas pembangunan, alokasi anggaran, strategi pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang diharapkan.

6. **Penyampaian Hasil Diskusi:**

- Hasil diskusi, aspirasi, dan usulan yang telah disusun dipresentasikan dan disampaikan kepada semua peserta.
- Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak memahami dan setuju dengan hasil Musrenbang.

7. Penutupan Acara:

- Acara ditutup dengan kesimpulan dari pimpinan acara mengenai hasil Musrenbang dan langkah-langkah selanjutnya.
- Peserta diingatkan untuk terus berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah disepakati.

8. Dokumentasi dan Tindak Lanjut:

- Hasil Musrenbang, termasuk aspirasi, usulan, kesepakatan, dan kesimpulan, didokumentasikan secara rinci.
- Langkah-langkah tindak lanjut dilakukan untuk mengintegrasikan hasil Musrenbang ke dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penganggaran dan implementasi program-program prioritas.

9. Pemberian Penghargaan:

Pemberian Penghargaan:

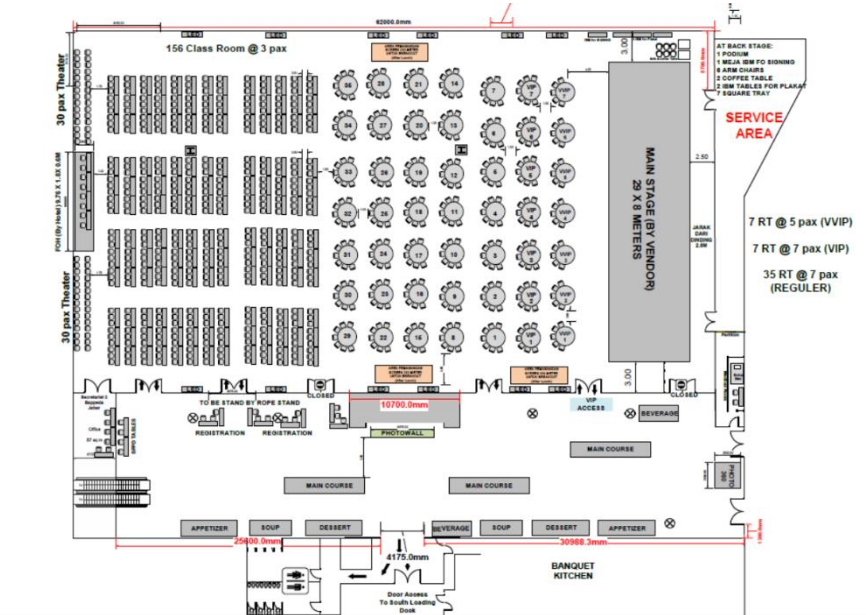
1. Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat:
 - a. Kabupaten Terbaik:
 - i. Kabupaten Garut;
 - ii. Kabupaten Sumedang;
 - iii. Kabupaten Bandung.
 - b. Kota Terbaik:

- i. Kota Depok
 - ii. Kota Sukabumi
 - iii. Kota Tasikmalaya
 - c. Kabupaten dengan Inovasi Pembangunan
Daerah Terbaik: Kabupaten Sukabumi
 - d. Kategori Kota dengan Inovasi Pembangunan
Daerah Terbaik: Kota Sukabumi
2. Penghargaan CSR Award:
- a. *CSR Governance Award* (Tata kelola CSR di Kabupaten/Kota)
 - i. Kabupaten Karawang
 - ii. Kabupaten Bogor
 - iii. Kota Bandung
 - b. *Local Champion* (Penghargaan untuk orang/keompok binaan perusahaan)
 - i. *Local Champion Economic*:
Hendri Wahyudi binaan PT Pertamina
Geothermal Energy Area Kamojang
 - ii. *Local Champion Sosial*:
Yeyet Kurniawati binaan PT PLN Indonesia
Power UBP Saguling
 - iii. *Local Champion Environment*:
Duduy Abdullah binaan PT PLN Nusantara
Power UP Cirata
3. Penghargaan Forum Perangkat Daerah:
- a. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;

- b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
4. Pemberian bantuan Program Dhuafa Investor dan Pra Koperasi
- a. Pemberian bantuan modal Usaha melalui Dhuafa Investor yang diserahkan oleh Pak PJ. Gubernur kepada penerima manfaat dari Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Pemberian bantuan modal Usaha melalui Pra Koperasi yang diserahkan oleh Pak Pj. Gubernur kepada dari Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan Desa Lebak Mekar, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon
5. Penyetempatan rompi oleh Pak Pj. Gubernur kepada 3 Orang pendamping Program Dhuafa Investor dan Program Pra Koperasi

Layout pelaksanaan Musrenbang

Layout Trans Convention Center pada acara Musrenbang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



2.2 Sesi diskusi / *sharing discussion*

Diskusi pada acara Musrenbang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan bagian kunci dari proses perencanaan pembangunan untuk penyusunan dokumen dengan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Berikut poin yang dapat diambil dari diskusi tersebut:

1. Tujuan Pembahasan:

Menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan Musrenbang terkait RPJPD, yaitu untuk menggali aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait prioritas pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut.

2. Pemaparan RPJPD:

- Tim perencanaan atau pemerintah daerah memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah disusun sebelumnya;
- Pemaparan mencakup visi, sasaran visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan indikator Utama Pembangunan.

3. Diskusi Terbuka:

- Memberikan kesempatan kepada peserta Musrenbang, termasuk masyarakat, organisasi, dan stakeholder terkait, untuk mengemukakan pendapat, saran, dan masukan terkait RPJPD.
- Diskusi dapat meliputi aspek kebutuhan pembangunan, prioritas program, alokasi anggaran, strategi pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

4. Penyusunan Aspirasi dan Usulan:

- Peserta Musrenbang diberikan kesempatan untuk menyusun aspirasi dan usulan konkret terkait pembangunan yang diinginkan dalam RPJPD.
- Aspirasi dan usulan tersebut dapat berkaitan dengan sektor ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang relevan.

5. Pemilihan Prioritas Pembangunan:

Melalui diskusi dan konsultasi, prioritas pembangunan dalam RPJPD ditentukan berdasarkan urgensi, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

6. Kesepakatan Bersama:

Melalui proses diskusi dan negosiasi, diharapkan tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait terkait prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam RPJPD.

7. Tindak Lanjut dan Dokumentasi:

- Tindak lanjut dilakukan dengan mengintegrasikan masukan dari Musrenbang ke dalam RPJPD secara formal, serta mempersiapkan rencana tindak lanjut untuk implementasi program-program pembangunan.
- Hasil diskusi, aspirasi, usulan, dan kesepakatan yang dicapai didokumentasikan secara rinci.

Pada pelaksanaan acara *sharing discussion* ini melibatkan berbagai pihak, seperti Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, dalam diskusi terbuka untuk mengumpulkan masukan, saran, dan aspirasi terkait pembangunan diantaranya:

1. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Para Pemegang Mitra/Sektor Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Sekretariat Forum Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Barat;
5. Ketua Forum Disabilitas;
6. Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat;
7. Ketua Kamar Dagang Indonesia;
8. Ketua Asosiasi Pengusaha;
9. Pendamping KUKM;
10. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI);
11. Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat (KREASI Jabar);
12. Ketua Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah;
13. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat;
14. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat;

16. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat;
17. Ketua Dewan Pemerhati Lingkungan Kawasan Tatar Sunda;
18. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat;
19. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air;
20. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten;
21. Pimpinan PT. Taspen (Persero);
22. Bapak Dr. Mei Susanto, S.H., M.H.;
23. Ibu Dr. Romeiza Syafriharti;
24. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si.;
25. Bapak Viktor Pirmana , S.E., M.Si.;
26. Bapak Prof. Ridwan Sutriadi, Ph.D.

Dengan dipandu/moderator pada acara tersebut sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si;
2. Bapak Sutrisno, ST.,MT;
3. Bapak Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc;
4. Ibu Ir. Andriazi Syah Yusi, M.Sc.;
5. Ibu Ir. Dewi Nurhayati, M.Si.

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

FORM KERTAS KERJA *SHARING DISCUSSION* RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan	
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	1. Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1. Dinas Pendidikan 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Sosial 7. Dinas Perumahan dan Permukiman 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1. Prof. Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. 2. Ketua Sekretariat Forum Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat 3. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Barat 4. Ketua Forum Disabilitas 5. Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat	Dr. Ir. Dewi Sartika, M.S	RUANG RAPAT I
		2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
		a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15				
		b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5				
		3	Penanganan Tuberkulosis:						
		a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	91	100				
		b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	100				

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangun Lainnya	Moderator	Keterangan
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89,31	99,5			
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil pembelajaran					
		a	Persentase kabupaten/kotaa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
			ij Literasi Membaca	22,25 – 24,25	71,81 – 3,81			
			ij Numerasi	1,70 – 3,70	65,20 – 7,20			
		b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangun Lainnya	Moderator	Keterangan
		i) Literasi Membaca	35,55 - 37,55	71,42 - 73,42				
		ii) Numerasi	19,34 - 21,34	63,01 - 65,01				
		c . Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 - 9,53	12,05 - 12,09				
		d . Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 - 12,88	14,24 - 14,29				
		6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 - 14,50				
		7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,30	75,00				

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan	
	3. Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85-6,46	0,09 - 0,34				
		9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04				
		10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70				
Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00	46,43 - 47,60	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil	1. Viktor Pirmana , S.E., M.Si. 2. Ketua Kamar Dagang Indonesia 3. Ketua Asosiasi Pengusaha Pendamping KUKM 4. HIPMI 5. Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat (KREASI Jabar) 6. Ketua Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah	Sutrisno, ST.,MT	RUANG RAPAT II
		12	Pengembangan Pariwisata						
		a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,15	4,89				
		b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Bintang) (Ribu Orang)*	536,60	1.341,50				
		13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06				

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan
		14 Produktivitas UMKM dan Koperasi			5. Biro Perekonomian			
		a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14	6. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan			
		b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86	7. Dinas Komunikasi dan Informatika			
		c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	12,5	8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			
		15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 - 6,99	6,1 - 7,1	9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
		16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3	10. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang			
		17 Tingkat Penguasaan IPTEK			11. Dinas Perhubungan			
		a. Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	12. Badan Penelitian dan			
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan
		a .	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30	85,05	Pengembangan Daerah		
		b .	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40	67,91			
	6. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,4	8			
	7. Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5,00			
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,7	23,8			
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	44,8			
	8. Pembentukan Pusat Kegiatan Wilayah yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
		a .	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100			

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan
	Pengembangan	b	Persentase Desa Mandiri (%)	23,26	78,75				
Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif	9. Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	2	Indeks Reformasi Hukum*	90,7	100	1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Biro Organisasi 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Biro Hukum dan HAM 6. Inspektorat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Badan Kepegawaian daerah	Dr. Mei Susanto, S.H., M.H.	Dr. Ir. Momon Rivai, M.Sc	RUANG RAPAT III
		4							
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00				
		6	Indeks Pelayanan Publik	4,60	5,00				
		7	Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89				
Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga	10. Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi Yang Berkualitas	2	Indeks Kepatuhan Daerah	84,08	94,08	1. Inspektorat 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Dr. Romeiza Syafriharti 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten	Ir. Andriazi Syah Yusi, M.Sc.	RUANG RAPAT IV
		8							
		9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan	51,78 (2020)	69,16				

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan	
Stabilitas Ekonomi			Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan 6. Badan Pendapatan Daerah 7. Biro Perekonomian	3. PT. Taspen (Persero)			
		30	Indeks Demokrasi Indonesia	84,12 - 87,37 (Tinggi)					Tinggi
		31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,2					4,6
	11. Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	32	Tingkat Inflasi (%)	3,3-3,9	1,1 - 3,2				
		33	Pendalaman/In termediasi Sektor Keuangan						
		a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	25,31	78,1				
		b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,24	2,78				
		c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	55.162,04	302.703,47				
		d.	Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8				

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan	
		3 4	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03				
	12. Peningkatan Kerjasama Regional Maupun Internasional	3 5	Efektivitas Kerjasama Internasional	90,91 (2023)	100				
		3 6	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5				
Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	13. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	3 7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Sumber Daya Air 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Prof. Ridwan Sutriadi, Ph.D 2. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat 3. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 4. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat 5. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat 6. Ketua Dewan Pemerhati Lingkungan	Ir. Dewi Nurhayati, M.Si	RUANG RAPAT V
		3 8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32				
	14. Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesetaraan Gender	3 9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05				
		4 0	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 - 0,45	0,23 - 0,21				
	15. Peningkatan Kualitas	4 1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741				

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangun Lainnya	Moderator	Keterangan
	Lingkungan Hidup	4 2	Kualitas Lingkungan Hidup			7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7. Kawasan Tatar Sunda Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air	
		a	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,27	57,68	8. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
		b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,50	85,00	9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		c	Pengelolaan Sampah			10. Dinas Perkebunan		
		-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,54 (2022)	90,00	11. Dinas Kelautan dan Perikanan		
	-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	47,77 (2022)	100	12. Dinas Kehutanan			
	16. Peningkatan Ketahanan Pangan, Air Dan Energi	4 3	Ketahanan energi, air, dan pangan			13. Biro Kesejahteraan Rakyat		
		a	Ketahanan Energi					
		-	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.404	2.670			

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

Misi	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Perangkat Daerah	Undangan Lainnya	Moderator	Keterangan	
		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165					
		b . Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	1,39					
		c . Ketahanan Air							
		- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4,93	63,12					
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100					
	17. Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah Dan Perubahan Iklim	4	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	131,62					107,27 - 86,47
		4							
		5	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
		a .	Kumulatif	2,66					31,65
		b .	Tahunan	9,27					70,08

2.3 Pelaksanaan Pameran tentang Pembangunan Jawa Barat

Pelaksanaan pameran pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi dan pengembangan ekonomi daerah. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan pameran tentang pembangunan Jawa Barat dapat mencakup beberapa hal, antara lain:

1. **Edukasi dan Informasi:**

- Memperkenalkan potensi dan capaian pembangunan Jawa Barat kepada masyarakat luas, termasuk pencapaian dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pariwisata, pendidikan, dan lingkungan.
- Memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan atau direncanakan di Jawa Barat.

2. **Promosi Investasi:**

- Mendorong investasi dan pengembangan ekonomi daerah dengan memperlihatkan peluang bisnis, inovasi teknologi, dan infrastruktur pendukung yang tersedia.
- Memperkenalkan sektor-sektor unggulan dan peluang investasi yang menjanjikan di Jawa Barat.

3. **Memperkuat Identitas Daerah:**

- Memperkuat rasa kebanggaan dan identitas masyarakat Jawa Barat terhadap prestasi dan potensi daerah mereka.
- Memperkenalkan kekayaan budaya, seni, dan tradisi daerah sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

4. Networking dan Kolaborasi:

- Membangun jaringan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, lembaga akademis, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
- Membuka kesempatan untuk kerjasama antarstakeholder dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Dengan demikian, pameran tentang pembangunan Jawa Barat dapat menjadi platform yang efektif untuk membangun kesadaran, partisipasi, dan kolaborasi dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Layout Pameran



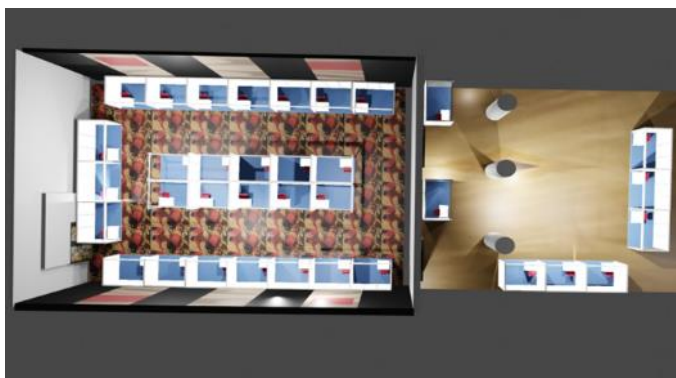
BOOTH 26 PERTAMINA
 BOOTH 27 BJB
 BOOTH 28 NESTLE
 BOOTH 29 PLN IND POWER
 BOOTH 30 PLN CIRATA
 BOOTH 31 PT SEMEN
 BOOTH 32 DISPERINDAG
 BOOTH 33 DISPERINDAG
 BOOTH 34 AWS
 BOOTH 35 DISKOMINFO

BOOTH 01 DKPP
 BOOTH 02 DISBUN
 BOOTH 03 DTPH
 BOOTH 04 DISHUT
 BOOTH 05 DKP
 BOOTH 06 DKUK
 BOOTH 07 DISPARBUD
 BOOTH 08 DISNAKERTRANS
 BOOTH 09 DSDA
 BOOTH 10 DISPORA

BOOTH 11 DISDIK
 BOOTH 12 DINSOS
 BOOTH 13 DPMPPTSP
 BOOTH 14 DINKES
 BOOTH 15 BAPENDA
 BOOTH 16 BPBD
 BOOTH 17 BMPR
 BOOTH 18 DISPERKIM
 BOOTH 19 DISHUB
 BOOTH 20 DESDM

BOOTH 21 DISDU
 BOOTH 22
 BOOTH 23 DISPU
 BOOTH 24 BAPPE
 BOOTH 25 DLH

Layout Pameran Pembangunan Jawa Barat



2.4 Peserta dan Narasumber Musrenbang Provinsi

Pelaksanaan Musrenbang akan dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari:

No	Peserta	Jumlah	
1	Pj. Gubernur Jawa Barat	2	Orang
2	Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat	5	Orang
3	Narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas;	1	Orang
4	Narasumber Menteri Dalam Negeri;	1	Orang
5	Narasumber Menteri Perindustrian Republik Indonesia	1	Orang
6	Narasumber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Orang
7	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dapil Jawa Barat)	50	Orang
8	Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dapil Jawa Barat)	4	Orang
9	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	120	Orang
10	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	81	Orang
11	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat	1	Orang
12	Asisten Daerah dan Staf Ahli Gubernur	6	Orang
13	Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;	45	Orang
14	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;	20	Orang
15	Para Kepala Instansi Vertikal di Jawa Barat;	81	Orang
16	Bupati/Walikota se-Jawa Barat;	27	Orang
17	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tetangga;	5	Orang
18	Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;	27	Orang
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota;	27	Orang
20	Rektor Universitas;	20	Orang
21	Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri;	27	Orang
22	Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;	27	Orang
23	Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Khusus Negeri;	27	Orang

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

No	Peserta	Jumlah	
24	Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta;	27	Orang
25	Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;	27	Orang
26	Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Khusus Swasta;	27	Orang
27	Perwakilan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta	14	Orang
28	Sesepuh, Tokoh Masyarakat, dan Keraton di Jawa Barat;	30	Orang
29	Media Masa dan Media Elektronik;	20	Orang
30	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat;	30	Orang
31	Mitra CSR Jawa Barat;	30	Orang
32	Organisasi Kemasyarakatan;	20	Orang
33	Perwakilan Asosiasi Profesi	49	Orang
34	Yayasan Sosial;	20	Orang
35	Tim Penyusun Dokumen RKPD Tahun 2025	100	Orang
JUMLAH PESERTA OFFLINE		1000	Orang

BAB III

PENUTUP

Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat tahun 2024 merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 sangat tergantung kepada kualitas perencanaan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan Kegiatan Musrenbang juga merupakan tanggung jawab semua pihak terkait dan kami selaku panitia pelaksana mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk menyukseskan acara ini.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tahun 2024.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Agenda Kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
2. Agenda Kegiatan Sharing Discussion pada Acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

RANGKAIAN ACARA PUNCAK MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045 DAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Hari/Tanggal : **Senin, 22 April 2024**
Tempat : **The Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto No. 289 – Bandung**

No	Kegiatan	Durasi (Menit)	Waktu	Keterangan
1.	Registrasi Peserta Undangan	45'	08.30 - 09.15	Panitia
2.	Pembukaan Acara	5'	09.15 - 09.20	MC Acara
3.	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	5'	09.20 - 09.25	Seluruh Peserta
4.	Pembacaan Do'a	5'	09.25 - 09.30	Ustadz
5.	Laporan Ketua Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	15'	09.30 – 09.45	Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan, S.T., M.Si.
	Video Musrenbang	5'	09.45 – 09.50	Panitia
6.	Arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	15'	09.50 – 10.05	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8.	<i>Talkshow / Tanya Jawab</i> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	40'	10.05 – 10.45	Para Narasumber

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

No	Kegiatan	Durasi (Menit)	Waktu	Keterangan
	Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia			
9.	<i>Performance</i>	10'	10.45 – 10.55	Panitia
10.	Sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat	10'	10.55 - 11.05	Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, SH.,MH
11.	1. Video Baznas 2. Launching Dhuafa Investor	15'	11.05– 11.20	Panitia
12.	Pemberian Penghargaan: 6. Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat: a. Kabupaten Terbaik; b. Kota Terbaik; c. Kabupaten dengan Inovasi Pembangunan Daerah Terbaik; d. Kategori Kota dengan Inovasi Pembangunan Daerah Terbaik 7. Penghargaan CSR Award: a. <i>CSR Governance Award</i> (Tata kelola CSR di	20'	11.20 – 11.40	Panitia

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

No	Kegiatan	Durasi (Menit)	Waktu	Keterangan
	Kabupaten/Kota) b. <i>Local Champion</i> (Penghargaan untuk orang/kelompok binaan perusahaan) iv. <i>Local Champion Economic</i> v. <i>Local Champion Sosial</i> vi. <i>Local Champion Environment</i> 8. Penghargaan Forum Perangkat Daerah			
13.	Penandatanganan Berita Acara Musrenbang	10'	11.40 - 11.50	Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin
14.	Sambutan Pj. Gubernur Jawa Barat	10'	11.50 – 12.00	Panitia
15.	Penutupan dan Persiapan Desk	5'	12.00 – 12.05	M.C

Agenda Pelaksanaan *Sharing Discussion* Pada Acara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024
Pukul : 13.00 s.d. 16.40 WIB

No.	Kegiatan	Durasi (menit)	Waktu	Keterangan
1	Registrasi Peserta	30	12.30 – 13.00	Panitia
2	Mobilisasi peserta menuju ruang rapat sesuai dengan pembahasan Misi	15	13.00 – 13.15	Moderator / <i>Session Chair</i> . MC.
3	Pembukaan acara diskusi dan penjelasan teknis acara	15	13.15 – 13.30	Moderator / <i>Session Chair</i> masing-masing Ruangan
4	<i>Sharing Discussion</i> Misi: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	150	13.30 – 16.00	Ruang Rapat I Penyampaian Komentar dan Masukan dari Peserta yang dipandu Moderator: 1. Perangkat Daerah 2. Undangan Lainnya 3. Pemegang Sektor/Mitra Perangkat Daerah Lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat
5	<i>Sharing Discussion</i> Misi: Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	150	13.30 – 16.00	Ruang Rapat II Penyampaian Komentar dan Masukan dari Peserta yang dipandu Moderator:

No.	Kegiatan	Durasi (menit)	Waktu	Keterangan
				<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Undangan Lainnya Pemegang Sektor/Mitra Perangkat Daerah Lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat
6	<p>Sharing Discussion</p> <p>Misi: Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif</p>	150	13.30 – 16.00	<p>Ruang Rapat III</p> <p>Penyampaian Komentar dan Masukan dari Peserta yang dipandu Moderator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Undangan Lainnya Pemegang Sektor/Mitra Perangkat Daerah Lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat
7	<p>Sharing Discussion</p> <p>Misi: Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi</p>	150	13.30 – 16.00	<p>Ruang Rapat IV</p> <p>Penyampaian Komentar dan Masukan dari Peserta yang dipandu Moderator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Undangan Lainnya Pemegang

No.	Kegiatan	Durasi (menit)	Waktu	Keterangan
				Sektor/Mitra Perangkat Daerah Lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat
8	<p>Sharing Discussion</p> <p>Misi: Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan</p>	120	13.30 – 16.00	<p>Ruang Rapat V</p> <p>Penyampaian Komentar dan Masukan dari Peserta yang dipandu Moderator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah 2. Undangan Lainnya 3. Pemegang Sektor/Mitra <p>Perangkat Daerah Lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat</p>
9	Rekapitulasi dan Reviu <i>Sharing Discussion</i> dari Narasumber dan masukan dari peserta	20	16.00 – 16.20	Ruang Rapat Masing Masing disampaikan oleh Moderator
10	Penutupan sesi Diskusi	20	16.20 – 16.40	Ruang Rapat Masing Masing disampaikan oleh Moderator



FORM MASUKAN, ABSENSI DAN MATERI MUSRENBANG TAHUN 2024



<https://bit.ly/MUSRENBANG-JABAR-2024>

